ANALISIS AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NAGARI MELALUI PENDEKATAN FENOMENOLOGI STUDI KOMPARATIF

(STUDI KASUS BUMNAG SONTANG CUBADAK DAN BUMNAG BAHAGIA PASAMAN TIMUR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)

Oleh:

ALWI FAHRIZAL
3419089

JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Edit dengan WPS Office

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/ 1444 H

Edit dengan WPS Office

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama / NIM	: Alwi Fahrizal / 3419089
Tempat / Tanggal Lahir	: Medan, 10 November 2001
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah.
Judul Skripsi	: Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Nagari Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif (Studi Kasus BUMnag Sontang Cubadak dan BUMnag Bahagia Pasaman Timur)

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas asli karya ilmiah sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan dicabut sampai waktu yang ditentukan.

Bukittinggi, 7 juli 2023

Yang menyatakan

Alwi Fahrizal

3419089

Edit dengan WPS Office

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"ANALISIS AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NAGARI MELALUI PENDEKATAN FENOMENOLOGI STUDI KOMPARATIF (Studi Kasus BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Pasaman Timur)"**. Yang disusun oleh **Alwi Fahrizal** program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun akademik 2023, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 07 Juli 2023

Pembimbing

Nini Sumarni, SE, M.Si

NIDN : 198810232018018012003

Edit dengan WPS Office

ABSTRAK

Alwi Fahrizal, NIM 3419089, Judul Skiripsi"Analisis Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Nagari Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif (Studi Kasus BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Pasaman Timur)". Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Dan Bisnis Islam (Febi) Universitas Islam Negeri(UIN) Bukittinggi.

Pengelolaan keuangan BUMNag yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan makmurkan BUMNag. Hal ini dikarenakan BUMNag juga memerluka ketersediaan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan BUMNAg. Ini merupakan tanggung jawab para pengelola BUMNag untuk memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana untuk kepentingan BUMNag. Tujuan peneliti ini membandingkan pola akuntabilitas dan pengelolaan keuangan BUMNag yang masih jarang diteliti, sehingga manfaat secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran agar lebih mengetahui pola akuntabilitas dan pengelolaan keuangan BUMNag melalui pendekatan fenomenologi studi komparatif. Analisis data yag digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian adalah data kualitatif dengan pendekatan fenomenologi studi komparatif dengan sebuah fenomena yang terjadi dalam lingkungan BUMNag. Data dikumpulkan dengan carawawancara, observasi, dan dokumntasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, walaupun tidak memiliki sop yang tertulis, namun dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan mengikuti aturan-aturan yang menjadi tradisi dalam pengelolaan BUMNag. Laporan keuangan BUMNag Bahagia diaudit oleh akuntan publik dua bulan sekali, sedangkan laporan keuangan BUMNag Sontang Cubadak belum pernah di audit, namun kewajaran laporan bisa dinilai oleh pemerinthan Nagari dan masyarakat secara langsung. Terdapat pemisahan fungsi pada pengeluaran kas BUMNag yang disimpan pada rekening bank. Tiap bulan BUMNag Bahagia memberi gaji para pegawai atau upah kepada pengelola BUMNag, sedangkan BUMNag Sontang Cubadak juga setiap bulannya memberikan gaji atau upah kepada pengelola BUMNag. Pengelolaan keuangan BUMNag sudah transparan dengan dapat diaksesnya laporan BUMNag oleh masyarakat melalui publikasi dan media yang dilakukan dan disediakan oleh pengelola, pengelola juga menerima saran dan kritik dari masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, pengelolaan Keuangan, Transparansi

Edit dengan WPS Office

KATA PENGANTAR

Rasa syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan pendidikan Standar 1 di Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.kemudian shalawat beriringan salam senantiasa kita mohonkan kepada-nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada kita sehingga menjadi kita umat yang beradap dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Akuntansi Syariah untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi. Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Nagari Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif (Studi Kasus BUMnag Sontang Cubadak dan BUMnag Bahagia Pasaman Timur).

Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang tulus kepada Ayahanda **Malkan Fahri** dan teristimewa Ibunda **Halimah HRP** tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memotivasi, serta mendo'akan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan

Edit dengan WPS Office

sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik, serta abang dan adek tersayang **Fajar Ramadhan** dan **Khairuman Munandar Haholongan** yang senantiasa memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibuk **Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, selaku Rektor Universitas Islam Negri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibuk **Hesi Eka Putri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibuk **Ariyun Anisah, S.E, M.E** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak **Ilham Illahi, SE, M.Sc** selaku dosen pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga semester akhir.
5. Ibuk **Nini Sumarni, SE, M.Si** selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya ditengah tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang membekali penulis dengan ilmu, arahan dan nasehat selama proses perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.

Edit dengan WPS Office

7. Teruntuk teman seperjuanganku dari awal semester yang selalu menemani, mendukung, memotivasi, serta membantu penulis dari awal perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi Syariah Khususnya Akuntansi Syariah Lokal C angkatan 2019 atas kebersamaan, dukungan, motivasi, kekompakan, kehebohan, semangat, serta dukungannya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang begitu luar biasa.
10. Terakhir, diri saya sendiri, Alwi Fahrizal atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dari awal sampai akhi dan berhasil mengalahkan rasa malas dalam mengerjakan skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Semoga mendapat ridho dan balasan pahala dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah skripsi ini bermanfaat. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Bukittinggi, 07 Juli 2023

Penulis

Alwi Fahrizal

Edit dengan WPS Office

NIM : 3419089

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 17

C. Batasan Masalah 18

D. Rumusan Masalah 18

E. Tujuan Penelitian 18

Edit dengan WPS Office

F. Manfaat Penelitian 19

G. Penjelasan Judul 20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Accountability Theory 22

B. Pengertian BUMNag 23

C. Tujuan dan Fungsi BUMNag 24

D. Pembentukan Unit Usaha 25

E. Jenis dan Pembentukan Usaha 26

F. Akuntabilitas Publik 28

H. Pengelolaan Keuangan Publik 30

I. Transparansi Keuangan BUMNag 36

J. Kajian Terdahulu 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 42

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 42

C. Jenis dan Sumber Data 42

D. Informan Penelitian 43

E. Tekni Pengumpulan data 43

Edit dengan WPS Office

F. Metode Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BUMNag 45

B. Temuan Penelitian 51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Edit dengan WPS Office

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkerdaulatan rakyat adil dan makmur . Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerakan utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan dengan baik dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guan mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Disamping itu juga, Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumberdaya alamnya. Akan tetapi pengelolaan sumber daya alam di beberapa daerah belum merata. Oleh karna itu,

Edit dengan WPS Office

potensi sumber daya alam yang tidak merata di daerah-daerah juga menjadikan indikasi penyebab dibutuhkannya suatu sistem pemerintah untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan bahkan negara. Maka di bentuk suatu sistem yang dinamakan otonomi daerah oleh pemerintah.

Otonomi desa merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. [1] Pemerintah desa memiliki wewenang unuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta melakukan upaya mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta melakukan upaya tersebut dibutuhkan adanya kebijakan perencanaan pembangunan desa dapat diartikan sebagai suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan di desa yang mencangkup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.[2] Allah SWT berfirmandalam Al-qur'an surah Al-furgan ayat 48-49 :

---

[1]Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 25

[2]Mustamin DKK, *Pembangunan Desa,* (LTA Fakultas Hukum, Univesitas Kendari,2014), hal 9

Edit dengan WPS Office

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *48. Dia lah yang meniupkan angina (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, 49. Agar kami mengihidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.*

Penjelasan dari Al-Furgan 48-49 adalah bahwa manusia haruslah selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Oleh Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga kita rawat dan kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikan-Nya. Serta merencanakan pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat, berharap pembangunan dan perkembangan kota mengarah kepada masyarakat lapisan bawah.

Terkadang kebijakan pembangunan tata ruang yang tidak didasari dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran islam kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, sudah banyak kasus-kasus tata ruang kota yang perencanaannya tidak berpedoman pada nilai-nilai islam, akhirnya

Edit dengan WPS Office

yang terjadi adalah kerusakan dan bencana.

Dalam rangka peningkatan kesejateraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa guna merasakan masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, desa memerlukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa nantinya mampu meningkatkan pendapatan desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi dasar dan acuan dalam segala aktivitasnya. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 78, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) haruslah didasarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Semakin besar potensi yang dimiliki oleh suatu desa maka semakin besar pula peluang Badan Usaha Milik Desa untuk mengelolanya.[3]

Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana desa dari pemerintah yang akan mengalir ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan

[3]Jeli Koso, *Manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, File:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/19203-38830-1-SM.pdf, (diakses pada tanggal 29 januari 2021), hal

Edit dengan WPS Office

tersebut dapat tepat sasaran dan dapat di rasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejateraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.[4]

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan memiliki oleh pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan prefesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes di bentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan Asli Desa (PAD), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejateraan masyarakat desa.[5]

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan

[4]Abdul Halim, M.Syam Kusufi, *Teori, Konsep Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik,* (Jakarta : Salembang Empa,2016), hal 481

[5] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 ayat (1)

Edit dengan WPS Office

pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Nagari disebut sebagai pembagian wilayah administratif sebelum kecamatan di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan di privinsi Sumatra Barat. Desa berbeda dengan nagari. Nagari merupakan bentuk sistem kekerabatan dan pemerintahan yang terdapat dalam kehidupan adat masyarakat Minangkabau yang kebanyakan bermukim di provinsi Sumatra Barat.

Perbedaan antara nagari dan desa tersebut dapat dilihat dari pengertian antara nagari dan desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka (1) menyatakan : “Desa adalah desa dan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan pengertian Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Nagari, Pasal 1 angka (7) menyatakan bahwa :”Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-

Edit dengan WPS Office

batas wilayah tertentu, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam wilayah Provinsi Sumatra Barat".[6]

Dari pengertian tersebut sangat jelas perbedaan dari pemerintah desa dan pemerintah nagari dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, dimana pemerintah nagari dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dipisahkan antara urusan adat dan urusan pemerintah secara administratif. Sedangkan dalam pemerintah nagari tidak demikian, urusan adat dan urusan pemerintah secara administratif diselenggarakan oleh pemerintah nagari. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan, bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya.[7]

Salah satu bentuk kebijakan pembangunan desa yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Nagari yang berlaku di Provinsi

---

[6]Fithrina, Hendria, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Kenagarian Sungai Talang Kab.Lima Puluh Kotasumatra Barat,* (Skiripsi: Univesitas Andalas Padang, 2016), hal 5

[7]Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejara Perkembangannya Dan Problematika,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran,2005), hal 95

Edit dengan WPS Office

Sumatra Barat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 87 ayat (1) yakni “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes/BUMNag”. Salah satu Kabupaten di Sumatra Barat yang memiliki BUMNag yaitu Kabupaten Pasaman. Keberadaan BUMNag di Kabupaten Pasaman terletak pada Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatra Barat.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang ada di Kenagarian Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman mulai berdiri pada tanggal 28 desember 2017, berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten pasaman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa. Dengan berbagai jenis usaha yaitu usaha agen gas, simpan pinjam, dan pendistribusian kakao.

Badan usaha ini mempunyai beberapa program kerja, dimana setiap kelompok tani yang ada di Nagari Sontang, nantinya akan dibantu dan dibina oleh BUMNag ini secara bergiliran. BUMNag ini akan membantu kelompok masyarakat Tani dengan cara memberikan sarana produksi seperti penyedian pupuk kandang, bibit dan pestisida. Pihak BUMNag sendiri mencanangkan beberapa perkembangan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan modal BUMNag. Dengan cara setiap

Edit dengan WPS Office

kelompok masyarakat tani menerima bantuan modal usaha, diharapkan dapat mengembalikan modal usaha seharga atau sebanding dengan pemberian BUMNag itu sendiri. Selain itu kelompok tani diharapkan juga dapat mengembangkan usaha dengan modal yang telah diberikan dengan baik, sehingga masyarakat bisa menghasilkan keuntungan dan memproduksi hasil olahan yang layak selain itu petani juga bisa menghidupkan lahan pertanian yang nantinya akan bernilai ibadah bagi petani tersebut sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surah Al-A'raf Ayat 58 menjelaskan :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًاۗ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ

الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ

Artinya : *"dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur"*[8]

Penjelasan dari Al-A'raf Ayat 58 adalah hati yang baik diserupakan dengan negeri yang baik dan tanah yang subur. Hatidan tanah merupakan tempat tumbuhnya tanaman dan penghasilan buah. Hati menumbuhkan niat dan perasaan, kesan dan tanggapan, arah dan tekad. Sesudah itu menimbulkan perbuatan

[8]Mahyuddin Barni Guru Besar Tafsir UIN Antasari, Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 26 Oktober 2018

Edit dengan WPS Office

dan bekas dalam kehidupan nyata. Tanah juga menumbuhkan tanaman-tanaman yang menghasilkan buah-buahan yang bermacam-macam rasa dan sejenisnya.

Petunjuk ayat-ayat Allah SWT, pelajaran dan nasihat turun ke dalam hati sebagaimana air turun ke tanah jika hati itu baik, bagaikan tanah yang subur niscaya ia akan terbuka dan menerima, tumbuh dan berkembanglah kebaikan di dalamnya. Mengutip pendapat Sayyid Quthb dalam Fi Zhila Al-Qur'an.

Program Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Kenagarian Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tidaklah banyak dan dapat dilihat dari program yang telah berjalan selama ini belum termanajemen dengan baik. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Kanagarian Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, juga mempunyai program kerja yang baru yaitu membantu petani dalam hal pembuatan pupuk organik dan kelompok pemberdayaan ikan dengan kerja sama membuat pelet atau ikan organik, untuk kedua program tersebut yaitu pupuk organik dan pelet organik.

Berdasarkan pengamatan dilapangan adapun permasalahan yang penulis lihat yaitu pada tahap pelaksanaan pengelola belum maksimal, karena kurangnya organisasi kepengurusan yang hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dan dua orang staff unit

Edit dengan WPS Office

usaha sehingga tugas dan fungsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) tidak efektif, begitu juga dengan dana atau keuangan yang tidak lancar sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan kerja BUMNag, kerangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan unit usaha serta kesadaran atau partisipasi masyarakat masih rendah. Pada tahap pengawasan dalam meleksakan kegiatan usaha, kurangnya keterlibatan anggota pengawas dalam mengawasi sehingga membuat kinerja pengurus kurang begitu baik.

Dana Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang di serahkan kepada pihak nagari dan masyarakat melalui pemerintah nagari.[9]

Dana BUMNag berasal dari :

1. Pemerintah Nagari
2. Tabungan Masyarakat
3. Bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi Sumatara Barat, dan pemerintah Kabupaten Pasaman
4. Pinjaman atau kerja sama dengan pihak lain.[10]

[9] Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Miliik Nagari (BUM Nagari) Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

[10] Sumber data : Kantor Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Edit dengan WPS Office

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) juga memiliki produk kerajinan yang dibuat oleh masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Bakul dodol dari daun pandan
2. Dompet dari daun pandan
3. Tikar pandan dari daun pandan
4. Tas dari daun pandan
5. Tempat tisu dari daun pandan
6. Asbak dari batok kelapa
7. Gantungan kunci dari batok kelapa
8. Lampu hias dari batok kelapa.[11]

Dalam kegiatan pelaporan pertanggungjawaban BUMNag merupakan pelaporan atau seluruh kegiatan yang dilakukan. Laporan pertanggungjawaban BUMNag disusun atau dibuat oleh ketua, sekretaris, dan bendahara. Item dari pelaporan yang harus dimaksukkan ke dalam LPJ BUMNag oleh ketua berupa seluruh kegiatan mulai dari program kerja, pemilihan ketua pelaksana, serta kendala dan sarana selama kegiatan.

Pelaporan yang harus dibuat oleh bendahara keuangan adalah pelaporan seluruh keuangan mulai dari sumber dana, tambahan dana yang diperoleh, rincian pengeluaran dana anggaran

[11] Sumber data : Kantor Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Edit dengan WPS Office

yang digunakan, dan yang paling penting adalah bukti pembayaran pengeluaran.[12]

Tabel 1.1

Laporan Penggunaan Anggaran Penyertaan Modal Unit Usaha Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Tebu (Gula Merah) Tahun 2022

No	Kegiatan	Tanggal	Uang masuk	Uang keluar
	Modal			
	Unit Usaha Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Tebu (Gula Merah)			
	Rincian ebagai berikut:			
1.	**Bangunan fisik**			
	Batu kali 10 kubit			1.750.000
	Semen 60 sak			4.100.000
	Pasir 10 kubit			850.000
	Krikil tambunan 200 kubit			16.000.000
	Tiang kayu puli 17 BTG			2.550.000
	Kayu bulat 75 BTG			1.500.000
	Kayu reng 90 BTG			1.530.000
	Kayu ukuran 10*10 6 BTG			420.000
	Seng 9 kodi			12.870.000

[12] Sumber data : Kantor Badan Uasaha Milik Nagari (BUMNag).

Edit dengan WPS Office

	Paku 30 kg			600.000
	Papan 50 LMR			1.750.000
	Kayu 5*7 12 BTG			420.000
	Rabuing atap 5 buah			125.000
	Tungku masak tebu 1 unit			3.500.000
	Bak penampung air tebu 1 unit			2.600.000
	Upah tukang			18.120.0000
2.	Perlengkapan / investasi			
	Mesin giling tebu 1 unit kapasitas 3 ton/hari			32.000.000
3.	Perkebunan tebu			
	Persiapan lahan 2 Ha			
	Herbisida basmilang 24 LTR			3.000.000
	Upah semprot 2 Ha			2.000.000
	Upah bikin tapak kuda / lubang tanah 10.000 lubang			15.000.000
4.	Penanaman tebu			
	Bibit untuk 10.000 lubang			10.000.000
	Upah tanam 2 Ha			7.500.000
5.	Penyiangan lahan 2 Ha			
	Herbisida selektif			

Edit dengan WPS Office

	Kresnator 24 LTR			3.480.000
	Volgar 400 ml 24 botol			1.560.000
	Upah semprot 2 Ha			2.000.000
	Kayu bania konsen 2 kubit			5.400.000
	Kayu surian 40x60 *2,5M 2,5 kubit			7.000.000
	Jati 1 kubit			2.500.000
	Cat kayu 5 KLG			375.000
	Tiner 5 kg			325.000
	Jumlah	90.847.000		90.847.000

Sumber data: kantor BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman

Dari table di atas merupakan laporan keuangan Unit usaha perkebunan dan pabrik pengelolaan Tebu (Gula Merah) Badan Usaha Milik Nagari Bahagia Kecamatan Padang Gelugur, laporan keuangan tersebut menjelaskan mengenai transaksi-transaksi apa saja yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Pencatatan transaksi merupakan langkah awal terciptanya informasi dalam suatu badan usaha yang kemudian akandi tindak lanjuti sehingga menghasilkan laporan keuangan. Sebagai mana unit usaha perkebunan dan pengelolaan tebu didirikan untuk memberikan edukasi pemampaatan lahan secara maksimal kepada masyarakat Nagari, disamping itu untuk menunjang penghasilan

Edit dengan WPS Office

bumnag juga mendirikan pabrik pengelolaan tebu agar hasil panen tebu masyarakat dapat di beli oleh bumnag kemudian di olah oleh bumnag sehingga meberikan nilai jual yang dari bahan baku yang dimiliki masyarakat.

Tabel 2.1

Laporan Penggunaan Anggaran Penyertaan Modal Unit Usaha Tahun 2022

No	Kegiatan	Tanggal	Uang Masuk	Uang Keluar
	MODAL			
	UNIT USAHA PERDAGANGAN GAS ELPIJI			
	RINCIAN SBB :			
	TABUNG 3 KG 100 BIJI			19.000.000
	TABUNG 5,5 KG NON SUBSIDI 10 BIJI			4.600.000
	SEWA GEDUNG			2.500.000
	JUMLAH			26.100.000

Sumber data: kantor BUMNag Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman

Tabel diatas merupakan laporan keuangan Unit usaha perdagangan Gas Elpiji Badan Usah Milik Nagari Sontang Cubadak

Edit dengan WPS Office

Kecamatan Padang Gelugur, laporan keuangan tersebut menjelaskan mengenai transaksi-transaksi apa saja yang terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Entitas atau badan usaha dalam menjalankan bisnisnya perlu melakukan pencatatan transaksi untuk mengetahui biaya apa saja yang masuk keluar dalam suatu badan usaha. Pencatatan transaksi juga harus dilakukan dengan benar karena akan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu badan usaha. Pencatatan transaksi ini harus dicatat serinci mungkin karena dari pencatatan transaksi suatu badan usaha dapat diketahui keuntungan suatu usaha yang dijalankan.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **(Analisis Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Nagari Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif (Studi Kasus BUMNag Sontang Cubadak Dan BUMNag Bahagia Pasaman Timur).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belaka ng diatas, maka dapat identifikasi permasalahan sebagai berikut:

a. Tidak adanya papan informasi tentang pengeluaran dan pemasukan Alokasi Dana Nagari.

Edit dengan WPS Office

b. Kurangnya koordinasi antara pengurus, pengawas dan masyarakat Nagari sehingga dapat menimbulkan penyelewengan Alokasi Dana Nagari.

C. Batasan Masalah

Ruang Lingkup Batasan Penelitian Batasan masalah dalam penulisan ini Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan BUMNag Melalui Pendekatan Fenomenologi studi komparatif.

D. Rumusan Masalah

Berdsarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Nagari melalui pendekatan fenomenologi studi komparatif.

b. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Nagari melalui pendekatan fenomenologi studi komparatif.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Nagari melalui pendekatan fenomenologi studi komparatif.

Edit dengan WPS Office

b. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Nagari melalui pendekatan fenomenologi studi komparatif.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Penelitian

   Penelitian ini berguna untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan masukan Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan BUMNag Melalui Pendekatan Fenomenologi studi komparatif. Penelitian ini juga akan digunakan sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

2. Perusahaan

   Penelitian ini sebagai bahan untuk Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan BUMNag Melalui Pendekatan


Edit dengan WPS Office

Fenomenologi studi komparatif.

3. Akademis

Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi peneliti.

4. Untuk penelitian lain

Bagi pihak lain, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan proposal.

5. Untuk pengembangan ilmu

Menambah wawasan keilmuan di bidang akuntansi serta perusahaan khususnya dalam Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan BUMNag Melalui Pendekatan Fenomenologi studi komparatif.

G. Penjelasan Judul

Analisis : Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Nagari Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif (Studi Kasus BUMNag Sontang Cubadak Dan BUMNag Bahagia Pasaman Timur).

Edit dengan WPS Office

Akuntabilitas : Akuntabilitas adalah bentuk dari tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Yang mana pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertangungjawaban yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksitensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat.

BUMNag : Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan badan usaha yang dikelolah oleh pemerintah suatu nagari serta masyarakat yang pengurusnya terpisah dari nagari. Adapun tujuan terbentuknya BUMNag yang sesuai dengan permendegri 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik nagari yaitu untuk mengasah potensi wirausaha yang ada disuatu nagari dan juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat, didirikan badan usaha milik nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi disebuah nagari.


Edit dengan WPS Office

Edit dengan WPS Office

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Grand Theory

a. Accountability Theory

Akuntabilitas bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan pengusahaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mandat. Sedangkan Lembaga administrasi negara menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam lingkungan birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, pertanggungjawaban, tanggung gugat. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban

Edit dengan WPS Office

untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, dalam bidang keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Hubungan antara teori ini dengan penelitian ini adalah terkait kontrak dimana kontrak tersebut adalah wewenang kepada untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggung jawab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang desa. Dalam hal ini dengan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa yang bertanggung jawab kepada masyarakat desa sebagai pemberi Amanah dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintahan BUMNag.

b. Pengertian BUMNag

BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian modalnya dimiliki oleh pemerintah Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna untuk mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari dan untuk mengelola ekonomi secara otonom yang berbasis kekeluargaan.[13]

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah lembaga usaha Nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah dalam upaya memperkuat perekonomian Nagari dan dibentuk

[13]Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Edit dengan WPS Office

berdasarkan kebutuhan dan potensi Nagari.[14]Berbeda halnya dengan wilayah-wilayah lain yang menggunakan sebutan BUMDes, karena wilayah tersebut menggunakan nama Desa untuk sebutan wilayah administrasi yang ada di bawah Kecamatan. Sedangkan Provinsi Sumatra Barat menggunakan nama Nagari untuk wilayah administrasi di bawah Kecamatan. Ini disebabkan Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu daerah yang mendapatkan otonomi daerah oleh pemerintah.

Menurut Peraturan menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang besaral dari kekayaan Desa yang di pisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahtraan masyarakat Desa.[15]

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) didirikan melalui musyawarah warga masyarakat Nagari dan ditetapkan dengan peraturan Wali Nagari. Akan tetapi organisasi pengelolaan BUMNag terpisah dari organisasi pemerintahan Nagari. BUMNag

[14] https://id.scribd.com/doc./310241619/badan-Usaha-Milik-Nagari, diakses pada 02 februari 2021.

[15] Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa.

Edit dengan WPS Office

dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong.

c. Tujuan dan Fungsi BUMNag

Pendirian BUMNag bertujuan:

1) Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Nagari.

2) Mengoptimalkan asset nagari agar bermamfaat untuk kesejahteraan Nagari.

3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari.

4) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

d. Pembentukan Unit Usaha

Sebagaimana langkah awal untuk memanfaatkan potensi Nagari maka BUMNag mendirikan unit usaha yang terdiri dari :

1) Unit usaha cafe

Unit usaha cafe di didirikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang perdagangan kuliner di samping itu juga menyerap tenaga kerja yang sesuai kebutuhan cafe itu sendiri.

2) Unit Usaha Las

Edit dengan WPS Office

Unit usaha las didirikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang per las an dan untuk memanfaatkan kemampuan skil dari masyarakat nagari itu sendiri sehingga dengan begitu masyarakat berdayakan berdasarkan kemampuannya.

BUMNag koto Nan Tigo dibentuk dan diberi penyertaan modal oleh Nagari Bahagia padang Gelugur pada bulan Desember 2017. Oleh karenanya, BUMNag koto Nan Tigo efektif beroperasi baru dimulai pada tahun 2018. Pada awal kiprahnya ini BUMNag koto Nan Tigo membuka unit usaha bengkel las. Unit usaha didirikan dalam upaya memudahkan akses masyarakat dan nagari khususnya untuk memperoleh peralatan dengan basis las.[16]

e. Jenis dan Kegiatan Usaha

Bagian Ketiga jenis pengembangan usaha pasal 60 mengatakan:

1) BUMNag dapat menjalankan jenis usaha prioritas yang mencangkup:

a) Pengelolaan sumber daya alam

b) Industri pengelolaan berbasis sumber daya lokal

[16] Sumber data : Kantor Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) "KOTO NAN TIGO BAHAGIA" Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Edit dengan WPS Office

c) Jaringan distribusi

d) Permodalan atau keuangan skala nagari

e) Pelayanan publik.

2) Jenis usaha pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a) Pengelolaan air bersih skala Nagari

b) Pengelolaan air minum skala Nagari

c) Pengelolaan pertambangan umum skala Nagari

d) Pengembangan budidaya pertanian, peternakan, perikanan.

3) Jenis usaha industri pengelolaan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a) Pengelolaan sampah atau limbah skala Nagari

b) Pengelolaan home industry skala Nagari

c) Pengelolaan biologis skala Nagari

d) Pengelolaan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, berskala Nagari meliputi : beras, jagung, gula aren/gula kelapa, cabe, daging sapi,daging ayam, telor ayam, ikan, sayur-mayur, buah-buahan.

Edit dengan WPS Office

4) Jenis usaha jaringan industry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a) Jaringan distribusi pupuk

b) Jaringan distribusi bahan bangunan

c) Jaringan distribusi hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan

d) Jaringan distribusi gas LPG

5) Jenis usaha permodalan/keuangan skala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a) Jasa keuangan inklusif

b) Agen pos nagari

c) Simpan pinjam

d) Agen penggadaian nagari

e) Pembelian dan pembayaran online

f) Pembayaran non tunai.

6) Jenis usaha pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

a) Transportasi untuk mengangkut hasil komoditi/produk

Edit dengan WPS Office

Nagari

b) Pasar Nagari

c) Warung Nagari

d) Komunikasi Nagari

e) Listrik Nagari

f) Kebersihan

g) Pendidikan non formal skala Nagari.[17]

Namun jenis usaha yang di kembangkan berdasarkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Nagari. Beberapa jenis usaha yang hingga saat ini yang masih bertahan dijalankan yakni terdiri dari simpan pinjam, pendistibusian kakao dan agen gas LPG.[18]

2. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang diberikan amanah oleh masyarakat untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya atas keberhasilan ataupun kegagalan

[17]Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari Dan Badan Usaha Milik Nagari Bersama.

[18] Halomoan, Ketua Badan Usaha Milik Nagari, *wawancara*, Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, 04 Februari 2023.

Edit dengan WPS Office

dalam kinerjanya. Akuntabilitasterkait erat dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Dengan demikian secara sederhana akuntabilitas dapat dimaknai sebagai satu langkah pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan dari penjelasan dari Mardiasmo bahwa Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertangungungjawaban yang dikerjakan secara berkala.[19]

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiaban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya ataupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintah harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan

[19] Mardiasmo, 2012, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta : Andi offset,h.46)

Edit dengan WPS Office

tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah Daerah.[20]

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencangkup aspek-aspek kemudahan pemberian mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari suatu jawaban atas apa yang dipertanggungjawabkan berdasarkan mengenai hal apa yang benar terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi.Apabila terjadi akuntabilitas terjadi penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan tersebut segrera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari penjelasan tersebut sesuai dengan konsep menurut Hulmen dan Turner akuntabilitas yang mana merupakan konsep yang kompleks memiliki tujuan sebagai :“Sebagai konsep yang

[20] Nasihatun dan Suryaningtyas,2015,Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,Bisnis,Vol.3,No.1

Edit dengan WPS Office

bersifat kompleks, akunabilitas berusaha mewujudkan objektivitas dalam reformasi sektor publik dan berusaha untuk mengurangi banyaknya praktik korupsi yang terjadi didalamnya. Konsep akuntabilitas dapat memandu dan memberikan tekanan pada actor-actor yang terlibat dalam organisasi publik untuk lebih bertanggungjawab dan maupun menjamin kinerja pelayanan publik yang baik pada masyarakat".[21]

Berdasarkan penejelasan di atas, maka dapat dipaparkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan utama dari penerapan akuntabilitas dalam organisasi publik. Tujuan tersebut meliputi strategi untuk mencegah praktik korupsi; menekankan pertanggungjawaban dari tindakan para aktor yang terlibat dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah. Oleh sebab itu, terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sector publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggung jawaban vertical (vertical accountability) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.[22]

---

[21] Hulme, David dan Mark Turner. 1997. Governance, Administration and Development: Making The State Work. London:Macmillan Press. Hal 123

[22] Mardiasmo, 2018, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET

Edit dengan WPS Office

Dari tujuan akuntabilitas dapat diinterprestasikan bahwa akuntabilitas harus lebih menekankan pertenggungjawaban kepada masyarakat setempat, sehingga dapat diperbaiki jika terjadi kesalahan. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama good governance antara lain yang tercermin sebagai kategori akuntabilitas. Hulmen dan Turner mengemukakan bahwa akuntabilitas memiliki beberapa prinsip sebagai berikut: "Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu dengan indikator yang meliputi 1) legitimasi para pembuat kebijakan, 2)keberadaan moral yang memadai, 3) kepekaan, 4) keterbukaan, 5) pemamfaatan sumberdaya secara optimal, 6) upaya peningkatan efesiensi dan evektivitas".[23]

Jadi menurut Hulmen dan Turner, akuntabilitas terkait dengan beberapa pertanyaan berikut ini:[24]

1) Apakah para elit yang berkuasa telah dipilih melalui suatu pemilihan yang jujur, adil dan dengan melibatkan partispasi publik secara optimal?

2) Adakah kualitas moral dan tingkah laku elit berkuasa cukup memadai?

[23] Raba, Manggaukang, 2006. Akuntabilitas Konsep dan Implentasi. Malang : UMM Press. Hal 115

[24] Ibid, hal 115-116

Edit dengan WPS Office

3) Apakah elit yang berkuasa memiliki kepekaan yang tinggi atas aspirasi yang berkembang di masyarakat?

4) Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai?

5) Apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal?

6) Apakah dalam merumuskan kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien?

Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika:[25]

1) Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas keberhasilan yang diharapkan dari mereka;

2) Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggung jawabnya; bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.

3) Bila tindaka yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya; dan

4) Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya

[25] Ibid, hal 122-133

Edit dengan WPS Office

menghargai mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi.

3. Pengelolaan Keuangan BUMNag

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimipin dalam menggerakkan bawahnya yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi rencana atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah tindakan administrasi yang berhubungan dengan pencatatan sumber pendapatan dalam menjalakan kegiatan usah BUMNag.

Sumber-sumber penerimaan BUMNag berasal dari pemerintah Nagari, tabungan masyarakat, bantuan pemerintahan, pinjaman yang mengikat dan kerja sama usaha dengan pihak lain. Prosedur pengelelolaan keuangan BUMNag mencangkup alur penganggaran, alur penatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal. Alur penganggaran menjelaskan tentang rencana alokasi anggaran yang akan ditetapkan dalam menandai belanja operasional BUMNag. Alur anggaran tersebut antara lain:

a. Kepala Desa membuat kebijakan terlebih dahulu sehingga unit usaha membuat anggaran yang akan digunakan.

Edit dengan WPS Office

b. Anggaran unit BUMNag diserahkan ke Bendahara.

c. Bendahara menggabungkan dengan anggaran unit BUMNag lainnya untuk menjadi Pagu Indikatif.

d. Pagu Indikatif dilaporkan dan dibahas Kepala Desa ke dalam forum Musyawarah Desa.

e. Ketika dalam musyawarah Desa sepakat maka menjadi pagu anggaran.

f. Disahkan dan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi RKAT.

Selain itu juga alur penatausahaan menjelaskan tentang alur penerimaan dan pengeluaran yang ada di BUMNag. Alur penatausahaan yaitu:

a. Penataan Uang Masuk

1) Unit usaha melakukan pencatatan bukti-bukti uang masuk/pendapatan.

2) Unit usaha menyerahkan pendapatan dan hasil pencatatan ke bendahara BUMNag.

3) Bendarhara BUMNag melakukan rekap data dan menyetorkan Pendapatan ke Bank.

Edit dengan WPS Office

b. Penatausahaan Uang Keluar

1) Kepala BUMNag membuat kebijakan kas kecil minimal di unit BUMNag.

2) Unit usaha BUMNag melakukan belanja menggunakan kas kecil yang ada di unit usaha.

3) Jika belanja nominal di atas kas kecil, unit usaha melakukan pengajuan ke bendahara BUMNag untuk melakukan pencairan dana. Biasanya pengajuan dana dilakukan dalam biaya pengadaan, penggajian dan khusus.

4) Ketika kas kecil sudah habis atau sangat minim, unit usah bisa melakukan pengajuan untuk pengisian kembali uang kas kecil ke bendahara BUMNag.

c. Pelaporan menjelaskan tentang laporan yang wajib BUMNag laporkan kepada Kepala Desa dan Masyarakat, berupa laporan buku kas umum, arus kas, realisasi anggaran bulanan dan laporan keuangan tahunan.

d. Pengendalian internal menjelaskan terkait evaluasi kinerja BUMNag dan pertanggungjawaban. Kepala Desa menilai kinerja yang digunakan oleh BUMNag, apakah BUMNag


Edit dengan WPS Office

melebihi realisasi anggaran atau tidak.[26]

4. Transparansi Keuangan BUMNag

Transparansi dibangun atas dasar kekebebasan arus informasi, proses, lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.[27] Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil yang dicapai.[28]

Transparansi mengandung arti bahwa pengambilan dan pengimplementasian keputusan dilakukan dalam tata cara cara mengikuti hukum dan peraturan, transparansi juga berarti informasi yang tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dala bentuk dan media yang

[26] Ibid., 67
[27] Raharjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 24
[28] Yulian Prabowo, *Tinjuan Hukum Islam Dalam Penerapan prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kelurahan way Dadi Baru)*, Skiripsi, Program Sarjana Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017, h. 45

Edit dengan WPS Office

mudah dimengerti. Transparansi dalam sektor publik (pemerintah) dan privat (swasta). Hal ini didorong oleh berkembangnya tuntutan lingkungan terhadap akses informasi. Transparansi juga sangata penting untuk mencegah terjadinya skandal, penyelewengan dan penyimpangan yang dapat menimbulkan kebangkrutan.[29]

Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang di ambil pemerintah. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Dalam bidang manajemen keuangan dapat dipahami sebagai keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan juga memadai terhadap informasi.[30]

---

[29] Lufi Aprilia, *Pengaruh Good University Governance Terhadap Kepuasan Mahasiswa (studi kasus pada mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang)*, Skiripsi Program Sarjana Fakultas FEBI UIN Walisongo, Semarang, 2017, h.24

[30] Good Governance Dalasm Islam (On-line), tersedia di https://jmf.fisipol.ugm.ac.id (27 September 2019)

Edit dengan WPS Office

5. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan kumpulan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti dalam penyelesaian artikel ini, penelitian mengembil referensi dari berbagai penelitian diantaranya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kajian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Tujuan Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Supatmi dan Judarmita (2017)	Pengaruh penjelasan sasaran anggaran, audit kinerja dan syistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengolahan dana desa	Kejelasan tentang sasaran anggaran audit kinerja, sistem pelaporan dan akuntabilitas pengolahan dana desa.	Hasil penelitian kejelasan sasaran anggaran, audit kinerja dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2.	Harista Widianti (2017)	Akuntabilitas dan transparansi alokasi dana	Untuk mengetahui akuntabilitas dan	Pada desa sumberejo pengolahan ADD sudah

Edit dengan WPS Office

		desa (studi pada desa sumbereju dan desa kandung kabupaten pasuruhan)	transparansi alokasi dana desa.	akuntabel dan transparan pada pelaporan dan pertanggung jawaban, sedangkan desa kandung menunjukkan hasil yang tidak trasparan dan akuntabel.
3.	Maria Fransiska Vina Febriani Manahan (2017)	Penerapan prisip *good governance* dalam perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa (studi pada desa wirorejo kabupaten bantul).	Untuk mengetahui prisip trasparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pertanggung jawaban dan pelaksanaan ADD.	Pada tahap pelaksanaan, perencanaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa wiroreo sudah sesuai dengan prinsip *good governance*.
4.	Susi Oksilawati (2017)	Analisis akuntabilitas pengolahan	Untuk mengetahui akuntabilita	Dalam tahap perencanaan yang dilakukan

Edit dengan WPS Office

		alokasi Dana Desa (studi kasus pada desa Bence kecamatan kedunggajang kabupaten lumajang).	s ADD tahun 2016.	dalam kegiatan musrembangdes. Dari 43 UU hanya 36 yang hadir dalam pelaksanaan. Tim pelaksanaan ADD memasang semua lapisan msyarakat desa dan warga juga bisa meakses data dari kantor desa. Pada proses pertanggung jawaban tim ADD melakukan pelaporan secara periodik.
5.	Julian Deni Setia (2018)	Akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah desa (studi	Untuk mengetahui akuntabilitas desa binginanyar	Dari analisis terhadap 10 indikator keberhasilan pengelolaan

Edit dengan WPS Office

		pada pemerintah desa ringinanyar kecamatan ponggok kabupaten Blitar.	.	dan penggunaan alokasi dana desa ringinanyar telah mampu memenuhi 8 indikator sehingga bisa dikatakan akuntabel.

Edit dengan WPS Office

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di kantor BUMNag yang beralamat di Sontang dan Tanjung Aro Kecamatan Padang Gelugur kabupaten pasaman. Waktu melakukan ini dimulai pada tanggal 06 Februari 2023.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari sumber asli atau pertama.[31] Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informasi yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data primer dengan melakukan penelitian langsung melalui observasi dan wawancara di kantor BUMNag Sontang dan Tanjung Aro Kecamatan Padang Gelugur kabupaten pasaman.

[31] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal 129

Edit dengan WPS Office

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan saja.[32] Data sekunder berupa data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan. Data ini berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal dan dari data-data yang mendukung atas permasalahan yang dibahas.

Dalam ini jenis dan sumber data yang peneliti gunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara di kantor BUMNag Sontang dan Tanjung Aro Kecamatan Padang Gelugur kabupaten pasaman.

4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Bendahara BUMNag dan sekretaris BUMNag.

[32] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal 123

Edit dengan WPS Office

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang peneliti gunakan merupaka semi terstruktur, pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan pemandu wawancara sebelum aktifitas wawancara dilakukan. Peneliti langsung mengajukan pertanyaan kepada ketua, bendahara dan sekretaris BUMNag terkait dengan Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Nagari Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi komparatif.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu memperoleh data-data tertulis berupa dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Nagari.

6. Metode analisis data

Metode yang dugunakan dalam penelitian ini adakah metode deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, seperti laporan pertanggung jawaban keuangan Badan Usaha Milik Nagari. Motode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu,

a. pengumpulan informasi kepada ketua, bendahara dan sekretaris kantor BUMNag Bahagia Tanjung Aro Kecamatan Padang Gelugur

Edit dengan WPS Office

kabupaten pasaman.

b. Pengumpulan informasi kepada ketua , bendahara dan sekretaris kantor BUMNag Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten pasaman

c. Menarik kesimpulan tentang apa yang peneliti temukan dilapangan dan menyajikan data yang diperoleh.

Edit dengan WPS Office

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BUMNag

1. Gambaran Umum BUMNag Sontang Cubadak

Nagari merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau pengganti dari desa atau kelurahan, yang digunakan oleh provinsi lain Indonesia. Kata nagari berasal dari bahasa “sanskerta” yaitu” nagarom” yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Bentuk lain dari kata ini anatra lain nagara, negara, negeri, nagori, nogori dan nogoro.[33]

Nagari adalah pembagian wilayah administrasi sesudah kecamatan di provinsi Sumatra Barat. Serta nagari juga diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang di akui dan di hornati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[34]

Nagari di pimpin oleh seorang Wali Nagari, dalam menjalankan tugasnya Wali Nagari di bantu oleh Sekretaris

[33] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nagari Diakses pada 02 februari 2021
[34] Atrianto, Pemetaan Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Berbasis, (Padang: CV. Dirga Jaya Indo, 2017). h. 1

Edit dengan WPS Office

Nagari (SekNag) dan beberapa pegawai Wali Negeri Sipil (PNS), akan tetapi dahulunya Wali Ngari di bantu oleh beberapa Wali Jorong. Wali Jorong juga disebut Wali Korong, sebutan tersebut digunakan untuk pemimpinan Jorong. Jorong adalah pembagian wilayah administrasi Indonesia yang berkependudukan dibawah Nagari. Dalam arti lain Jorong/Korong adalah sekumpulan pemukiman yang berkedekatan dan tidak dibatasi oleh sesuatu lahan bahan pemukiman. Secara umum, Nagari di Sumatra Barat merupakan sekumpulan Jorong/Korong yang dipisahkan oleh sungai, persawahan, ladang, kebun, atau hutan.[35]

Asal mula Terjadinya Nagari sontang Cubadak dari hasil penggabungan kampung-kampung terdahulu yang telah ada dan berkembang dilingkungan nagari Sontang Cubadak sekarang ini. Adapun kampung-kampung terdahulu (Tua) Nagari Sontang Cubadak diantaranya: Banjar masin, Sontang Lama , Tanah Lapang, Ulu Sontang, Napolen , Aek Bargot, Muara Tais, Binubu Baru dan Kubu Gadang. Dari aspek antropologi budaya, para penghuni didaerah perantauan ini mengalami proses budaya, para penghuni didaerah perantauan ini mengalami proses asimilasi (Kawin Campur), Akultursi (peralihan budaya dan adat istiadat) dan Artikulasi (perubahan

[35] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jorong diakses pada 02 februari 2021.

Edit dengan WPS Office

akses dan ucapan bahasa).

Setelah terjadi pemekaran nagari, para pemuka masyarakat Sontang Cubadak meminta kepada pemuka masyarakat Sontang agar nama Cubadak itu tidak lepas dari kenagarian Sontang. Dengan demikian, Nagari ini disebutlah dengan nama "SONTANG CUBADAK" yang mengkukuhkan hubungan erat anatar masyarakat Sontang Cubadak. Sekarang secara kepemerintahannya bergabung dengan Kecamatan Padang Gelugur, terhitung mulai dari sejak ditetapkannya menjadi Nagari pada tanggal 10 februari 2013 yang diresmikan oleh Bupati Pasaman.

Nagari Sontang Cubadak merupakan salah satu nagari yang ada di kecamatan Padang Gelugur, dimana terdiri dari 6 suku yaitu, Minang, mandailing, Melayu, Batak, Jawa dan sunda serta terdiri dari 4 jorong yaitu, Jorong Murni Sontang, Jorong Rambah, Jorong Binubu Kubu Gadang.

Berdasarkan data dan keterangan yang penulis peroleh dari kantor Wali Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur kabupaten Pasaman adalah satu dusun Nagari Sontang Cubadak berada di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat. Luas nagari: 19,45 kilometer persegi, atau 10,90 persen dari luas wilayah Kecamatan Padang

Edit dengan WPS Office

Gelugur.

Beradasarkan pendataan jumlah penduduk yang ada di kenagarian sontang cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman berjumlah 9.380 jiwa, dengan kepala keluarga 2.139 KK, pada maret 2023.

Kenagarian Sontang Cubadak secara umum memiliki 3 faktor pendukung perekonomian masyarakat, yaitu:

a) Faktor Alam (Sumberdaya Alam)

b) Faktor Manusia (Sumberdaya Manusia)

c) Faktor Lingkungan sosial masyarakat

Dari ketiga factor tersebut memberikan berbagi peluang yang berpotensi untuk di olah atau dikelolah dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi. Peluang akan semakin terbuka jika faktor pada kualitas sumberdaya manusia sudah dapat diandalkan, serta pemamfaatan sumberdaya manusia sudah dapat diandalkan, serta pemamfaatan sumberdaya alam juga harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Ada berbagai potensi ekonomi di Nagari Sontang Cubadak diantaranya yaitu: Sektor Pertanian, Perkebunan dan

Edit dengan WPS Office

Perdagangan.

2. Gambaran Umum BUMNag Bahagia

Perkembangan ekonomi berbasis potensi nagari sudah lama dijalankan oleh pemerintahan nagari dengan berbagai program. Namun belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan bersama, banyak factor yang menyebabkan kurang maksimalnya program-program tersebut, oleh karna itu di perlukan upaya sistemasis untuk mendorong terlaksananya program penguatan ekonomi masyarakat dan juga bisa mengendalikan Nagari Bahagia sebagai Nagari mandiri. Maka BUMNag Bahagia hadir sebagai konsolidasi penguatan ekonomi masyarakat dan nagari dengan agenda memanfaatkan SDM dan SDA di Nagari yang bisa di berdayakan serta potensi lainnya dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Nagari sehingga lahirlah ide-ide dan sistem yang akan di kembangkan untuk penguatan ekonomi masyarakat sehimgga dapat meningkatkan pendapatan asli nagari (PAN).[36]

Bahwa dengan diterbitkannya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana di amanahkan dalam bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUMDes. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 136

[36] Sumber data : Kantor Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) Bahagia.

Edit dengan WPS Office

PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 5 peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, Pengelolaan Operasional, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dan dari rujukan itu didirikan lah BUMNag Bahagia pada tahun 2018.[37]

Sebagai Pelaksanaan operasional dipilihlah Direktur BUMNag Bahagia melalui musyawarah Nagari dan telah ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Wali Nagari Bahagia, dan untuk membantu tugas dari Direktur BUMNag dalam pengelolaannya Direktur BUMNag Bahagia mengankat Sekretaris dan Bendahara. Untuk memulai kegiatan awal pengurus yang dipilih menyusun rencana kegiatan dan unit usaha yang akan didirikan dengan pertimbangan kondisi dan potensi dari nagari serta prostek ekonomi yang ada di Nagari.

Dengan berdirinya beberapa unit usaha BUMNag Bahagia pada awal 2019 dengan menggunakan penyertaan modal dari pemerintahan Nagari. Maka dari itu menjadi dasar untuk pembuatan pelaporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Bahagia.[38]

Berdasarkan data dan keterangan yang penulis peroleh

[37] Sumber data : Kantor Badan Usaha Milik Nagari (BUM NAGARI) Bahagia.
[38] Sumber data : Kantor Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) Bahagia.

Edit dengan WPS Office

dari kantor Wali Nagari Bahagia Kecamatan Padang Gelugur kabupaten Pasaman adalah satu dusun Nagari Bahagia berada di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat. Luas nagari: 20,45 kilometer persegi, atau 11,90 persen dari luas wilayah Kecamatan Padang Gelugur.

Beradasarkan pendataan jumlah penduduk yang ada di kenagarian Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman berjumlah 8.350 jiwa, dengan kepala keluarga 1.785 KK, pada maret 2023.

Kenagarian Bahagia secara umum memiliki 2 faktor pendukung perekonomian masyarakat, yaitu:

a) Aspek sosial masyarakat

b) Aspek ekonomi masyarakat

Dari kedua faktor tersebut memberikan berbagi peluang yang berpotensi untuk di olah atau dikelolah dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi. Peluang akan semakin terbuka jika faktor pada kualitas sumberdaya manusia sudah dapat diandalkan, serta pemamfaatan

Edit dengan WPS Office

sumberdaya manusia sudah dapat diandalkan, serta pemamfaatan sumberdaya alam juga harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Ada berbagai potensi ekonomi di Nagari Bahagia diantaranya yaitu: Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perdagangan.

B. Hasil Penelitian

a) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Pasaman Timur Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif

Akuntabilitas Pengelolaan keuangan dapat dilihat dari dua tahapan yaitu rencana jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja pemerintah Nagari (RKPNagari) guna untuk merencanakan pengelolaan keuangan BUMNag yang didalamnya berisi mengenai program-program yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sehingga perusahaan bisa berjalan lancar. Prinsip ini berkaitan dengan pengendalian terhadap hubungan organ-organ yang ada dalam sebuah perusahaan, yang mendorong setiap organ yang ada diperusahaan menyadari wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban. Pertanggungjawaban pemerintah mengenai pengelolaan

Edit dengan WPS Office

keuangan BUMNag yaitu kepada pemerintah Nagari dan masyarakat.

Pengelolaan keuangan BUMNag dikatakan akuntabel jika memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Mampu menyediakan informasi penyelenggaraan BUMNag secara terbuka, cepat dan tepat.

1) BUMNag menyajikan pengelolaan keuangan realisasi berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan wawancara BUMNag Sontang Cubadak mengenai kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan:

> "Kami sebagai pengelola BUMNag sudah membuat laporan tentang realisasi pengelolaan keuangan BUMNag sesuai peraturan yang berlaku dan menyampaikan laporan realisasi pengelolaan keuangan kepada Wali Nagari dan masyarakat yang disampaikan paling lambat akhir bulan maret tahun berikutnya "(Dede Kurnia Essya, S.Kom dikantor BUMNag).[39]

Berdasarkan hasil wawancara sekretaris BUMNag Sontang Cubadak, bahwa BUMNag sudah membuat laporan pengelolaan keuangan. Terlihat dari bukti fisik tersebut bahwa BUMNag sudah menyajikan

[39] Dede Kurnia Essya, sekretaris Badan Usaha Milik Nagari, Wawancara, Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, 02 Juni 2023.

Edit dengan WPS Office

laporan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang ada. Dengan adanya penyajian tersebut BUMNag dapat memberikan informasi kepada masyarakat.

BUMNag sudah menyajikan laporan keuangan secara tepat dan terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak adanya kecurigaan terhadap laporan pengelolaan keuangan BUMNag yang dibuat oleh bendahara. BUMNag sudah mempertanggungjawabkan laporang pengelolaan keuangannya kepada Wali Nagari dan masyarakat sesuai tahapan-tahapan setiap akhir tahunya. Buktinya setiap penerimaan dana, pengeluaran dan pendapatan tidak ada terjadi kendala laporan selalu disajikan dan diinformasikan secara bertahap dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMNag.

2) BUMNag menyampaikan laporan realisasi pengelolaan keuangan kepada Wali Nagari dan masyarakat.

Bedasarakan wawancara dengan bendahara BUMNag;

“Kami telah membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan keuangan BUMNag kepada Wali Nagari dan masyarakat. Namun kami tidak selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan tersebut dikarenakan

Edit dengan WPS Office

dalam pelaksanaan terjadinya perubahan anggaran, dalam pelaksanaan sehingga terjadi kendala sehingga itulah yang menghambat sehingga tidak sesuai target yang sudah ditentukan. Maka dari sanalah terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan ". (Halimah harahap dikantor BUMNag).

Jadi dari hasil wawancara dengan bendahara BUMNag dalam penyampaian pengelolaan laporan keuangan BUMNag belum tepat waktu karena adanya kendala. Terbukti pada proses perubahan anggaran. Hal ini membuat BUMNag tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan kepada Wali Nagari dan masyarakat. Upaya yang harus dilakukan BUMNag untuk tahun selanjutnya yaitu BUMNag bekerja sama dengan pemerintahan Nagari sebelum anggaran turun ke BUMNag supaya tidak ada kendala seperti tahun sebelumnya. Dengan melakukan upaya tersebut BUMNag akan mencapai da menerapkan prinsip akuntabilitas secara maksimal agar laporan tersebut bisa di informasikan secara tepat waktu.

b. BUMNag mampu memberikan layanan yang memuaskan bagi publik.

Edit dengan WPS Office

Berdasarakan wawancara dengan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh BUMNag.

> "BUMNag tidak memberikan batasan waktu bagi masyarakat dalam melayani kebutuhan masyarakat dengan kata lain, pelayanan diberikan saat masyarakat membutuhkan, ketetapan waktu dalam pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang ingin membeli kebutuhan sehari-harinya seperti membeli minyak goreng, telur, beras, dan lain-lain. BUMNag selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan BUMNag. (Malkan Fahri, di Jorong Rambah Lanai).[40]

Hal ini juga di ungkapkan masyarakat lain;

> "Ketika belanja ke BUMNag pengelolaah BUMNag lansung melayani saya dengan baik, ramah dan cepat". (Ernita Mala, di jorong Rambah Lanai).

Jadi hasil dari wawancara dengan masyarakat di daerah sekitar BUMNag Sontang Cubadak pengelola bahwa pengelola BUMNag selalu memberikan pelayana yang cepat dan ramah kepada masyarakat. Hal ini di buktikan bahwa seorang masyarakat ingin belanja kebutuhan sehari-hari ke BUMNag memberikan pelayanan yang memuaskan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan masyarakat yang di ingin kan dan tidak membedakan masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat

[40] Malkan Fahri, *Wawancara*, di Jorong Rambah Lanai, Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman 02 Juni 2023.

Edit dengan WPS Office

dan memberikan pelayanan tepat waktu. Anatara si kaya dan si miskin. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala pelayanan yang diberikan oleh BUMNag kepada masyarakat dapat dikatakan baik dalam memberikan pelayanan kebutuhan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketua BUMNag Bahagia mengenai kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan sebagai berikut:

> "Sebagai ketua BUMNag Bahagia yang diberikan amanah oleh masyarakat yang diperantarai oleh kepala desa saya beranggapan bahwa pengelolaan keuangan BUMNag Bahagia ini sangat penting bagi pengelolaan dan pengurus BUMNag, karena bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk kedepannya pengelolaan keuangan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kami dan agar ada bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan selanjutnya. Pemberian informasi hasil kerja kita sebagai pengurus akan kami sampaikan disetiap kesempatan yang tersedia, seperti MUSDES di aula desa, kami di BUMNag Bahagia membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin memberikan ide, gagasan maupun kritikan dan sejauh ini semenjak berjalannya BUMNag Bahagia alhamdulillah untuk masalah keterbukaan kami kepada masyarakat baik itu secara lisan maupun tulisan sudah kami terapkan dan rencananya kami akan mengadakan forum grup discussion untuk lebih memudahkan dalam memperoleh suntikan ide-ide segar dari kaummuda yang ada didesa Tanjung Aro, sehingga hal ini menjadi pokok pemikiran kita bahwa dana ini dari rakyat maka sepatutnya rakyat berhak penuh mengetahui kinerja kita".(Ketua BUMNag dikantor BUMNag Bahagia).[41]

[41] Khairuman Munandar Haholongan, Ketua Badan Usaha Milik Nagari Bahagia, *Wawancara*, Tanjung Aro Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, 05

Edit dengan WPS Office

Berdasarkan hasil wawancara sekretaris BUMNag Bahagia sebagai berikut:

> "Pengolahan keuangan BUMNag Bahagia sudah cukup baik dari sebelumnya dimana pada setiap akhir bulan BUMNag Bahagia membuat pelaporan keuangannya, dalam pengelolaannya BUMNag Bahagia memberikan seluruh akses informasi atau kebebasan kepada semua puhak yang terlibat dalam kegiatan kami di BUMNag Bahagia ini sebagai pelayanan masyarakat dalam membantu meningkatkan potensi ekonomi desa yang sesuai amanat konstitusi UU No 6. Tahun 2014 serta PERMENDES No 4 Tahun 2015 tentang desa dan BUMNag salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangannya yaitu yang mendasari kami memberikan keterbukaan informasi dalam mengelola BUMNag ini, selain itu kami selalu berkordinasi kepada pihak-pihak dalam menjalankan tugas ini baik itu mereka yang memberikan saran dan kritikan kami akan meresponnya dengan baik. Baik itu lisan maupun tulisan contohnya kami kemarin dalam pembentukan unit usaha di aula desa kami menyampaikan segala hal mengenai BUMNag ini. Alhamdulillah kami sejauh ini belum mengalami hambatan dalam penyampaian kinerja kami. Salah satunya kemaren pelaporan terhadap inspektorat berjalan dengan lancar karena semua data hasil kinerja sesuai dengan petunjuk teknis dan adapun untuk pelaporan hasil kinerja tahunan akan dilaporkan pada akhir tahun".(Sekretaris BUMNag, dikantor BUMNag Bahagia).[42]

Selanjutnya hasil wawancara dari masyarakat setempat BUMNag Bahagia sebagai berikut:

> "saya kurang tahu persoalan keuntungannya karna saya jarang terlihat didesa tetapi saya dengar dari

juni 2023.

[42] Halimah Harahap, Sekretaris Badan Usaha Milik Nagari Bahagia, *Wawancara*, Tanjung Aro Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, 05 Juni 2023.

Edit dengan WPS Office

> tetangga kalau BUMNag ini juga sangat baik dalam pelayanan terhadap masyarakat yang ingin berbelanja, dan BUMNag Bahagia ini melengkapi kebutuhan sehari-hari masyarakat agar masyarakat tidak jauh-jauh untuk belanja kebutuhannya BUMNag bahagia menyediakan kualitas yang baik dan juga harga yang sesuai dengan pasaran".(Amarullah masyarakat di sekitar kantor BUMNag).[43]

Berkaitan dengan akuntansi, Islam sudah menerapkannya pada masa Rasullah SAW seperti perhitungan pencatatan uang masuk dan uang keluar dalam perdagangan yang mencerminkan bahwa akuntansi dalam islam bukan lah yang baru dan penting digunakan untuk menjadikan kegiatan menjadi lebih baik seperti di BUMNag dan pasar perdagangan. Akuntansi dalam entitas tempat BUMNag pencatatan pelaporan keuangan dapat dijadikan tolak ukur kinerja para pengurus BUMNag selaku Ketua dan Bendahara BUMNag. Pernyataan senada disampaikan juga oleh sekretaris BUMNag Sontang Cubadak yaitu Ibuk Halimah Harahap. Ilmu akuntansi nya di butuhkan dalam mengelola keuangan BUMNag menggunakan istilah pembukuan secara tidak langsung mengikuti akuntansi jadi kita mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran tapi sistemnya bulanan bukan sistem kelanjutan atau masih sederhana.

[43] Amarullah, Wawancara Masyarakat di sekitar Kantor BUMNag Bahagia.

Edit dengan WPS Office

Akuntansi dalam entitas keagamaan seperti dua hal yang tidak memiliki keterkaitan yang baik, bagi orang awam. Namun semakin berkembangnya ilmu akuntansi saat ini dan juga kebutuhan publik akan hal tersebut, maka akuntansi atau pencatatan dengan model tradisional sudah diterapakan banyak entitas keagamaan yang melakukan pencatatan keuangan dengan metode yang diterapkan seperti pada suatu perusahaan dan lainnya. Asalkan pencatatan tersebut digunakan untuk kemajuan entitas keagamaan dan sebenar-benarnya hal itu menjadi sebuah keharusan. Pemisahan kehidupan spiritual dan keduniwian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, akuntansi pada batas mendukung kegiatan dalam mendukung tugas-tugas BUMNag.

Hal senanda juga terucap dari pernyataan Sekretaris BUMNag Ibuk Halimah Harahap. Bermanfaat sekali sebab kalau kita bicara keuangan itu kan istilah orang jawa mengatakan riwil (rawan), kalau pelaporannya tidak baik, tidak mudah dibaca, tidak semua mengerti, yang seperti itu pasti akan menjadi fitnah, dan kita tidak mengingkan itu, jadi manfaat dari pelaporan keuangan secara akuntansi atau dalam keuangan itu sangat penting sekali supaya mudah dipahami oleh semua pengurus BUMNag.


Edit dengan WPS Office

Akuntabilitas menunjukkan bentuk kewajiban bagi pengurus BUMNag (pihak yang penerimaan tanggungjawab untuk mengelola sumber daya) untuk melaporkan dan mengungkapkan sumber dan pengguna keuangan kepada pemberi dana BUMNag. BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur tidak memiliki *Standard Operation Procedure* (SOP) secara tertulis layaknya sebuah organisasi lain dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Kendati kemudian pihak pengurus BUMNag yang bertanggungjawaban tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam mengelola keuangan BUMNag. Sumber keuangan BUMNag berasal dari pemerintahan Nagari, tabungan masyarakat, bantuan pemerintahan, pinjaman yang mengikat dan kerja sama usaha dengan pihak lain.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada dana yang berasal dari pemerintahan Nagari, tabungan masyarakat, bantuan pemerintahan, pinjaman mengikat dan kerja sama usaha dengan pihak lain. Kedua pengurus BUMNag tersebut menerbitkan laporan keuangan atas dana yang telah dikelolahnya. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUMNag pada umumnya dalam bentuk sederhana yaitu laporan penerimaan dan pengeluaran kas bentuk

Edit dengan WPS Office

pencatatan *single entry*.

Contoh Format Laporan Keuangan BUMNag

No	Kegiatan	Tanggal	Uang Masuk	Uang Keluar
	Jumlah			
	Saldo Kas			

Sumber: Data diolah 2023

Kedua BUMNag tersebut berkawajiban melaporkan keuangannya pada pemerintah Nagari selaku pemberi dana kepada internal pengurus BUMNag sebagai bentuk tanggung jawab bendahara BUMNag. Pelaporan kepada pemerintah Nagari dilakukan dengan cara mempubliskan kondisi keuangan BUMNag pada pemerintah Nagari dalam kurun waktu tertentu, baik berupa laporan keuangan pada pihak tertentu, BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia melaporkan keuangannya kepada pemerintahan Nagari Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman

Edit dengan WPS Office

Timur melaporkan keuangannya kepada penasehat dan pengawas BUMNag Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur.

Laporan keuangan BUMNag Bahagia tiap dua bulan sekali melakukan audit secara formal sebagaimana laporan keuangan suatu organisasi lainnya diaudit oleh seorang Akuntan Publik. Sedangkan Laporan keuangan BUMNag Sontang Cubadak belum pernah di audit, namun pengurus BUMNag mengatakan bahwa kewajaran laporan keuangan yang diterbitkan oleh pengurus secara langsung dinilai oleh pemerintah Nagari dan internal kepengurusan BUMNag saat laporan keuangan tersebut dipublikasikan secara transparan. Selanjutnya laporan keuangan BUMNag juga bisa dinilai kewajarannya oleh pihak-pihak yang mendapatkan laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penerimaan Kas BUMNag umumnya berasal dari:

1) Pemerintah Nagari
2) Tabungan Masyarakat
3) Bantuan Pemerintahan
4) Pinjaman yang mengikat dan kerja sama usaha dengan pihak lain.

Edit dengan WPS Office

b) **Pengelolaan Keuangan BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif**

Untuk penerimanan kas, BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur penerimaan dana hanya boleh diterima oleh bendahara atau ketua pengurus BUMNag. Kedua BUMNag tersebut memiliki kas yang disimpan pada brankas BUMNag untuk digunakan pada keperluan rutin yang membutuhkan biaya terlalu signifikan. Jika diperlukan, Bendahara BUMNag diperbolehkan untuk langsung mengeluarkan kas pada brankas. Selanjutnya BUMNag juga memiliki kas yang disimpan pada rekening tabungan Bank yang memiliki dua spesimen atau lebih. Sehingga untuk menggunakan kas harus melalui persetujuan untuk menggunakan kas harus melalui persetujuan spesimen yang bersangkutan. Bank yang digunakan BUMNag Bahagia untuk menyimpan kas BUMNag adalah Bank BRI dan Bank Nagari sedangkan untuk BUMNag Sontang Cubadak tidak melampirkan Bank apa saja yang digunakan untuk menyimpan kas BUMNag.

Untuk pengeluaran kas, BUMNag Sontang Cubadak

Edit dengan WPS Office

tiap bulanya mengeluarkan dana untuk memberi gaji para pengurus BUMNag. Sedangkan BUMNag Bahagia juga mengeluarkan gaji para pengurus BUMNag. Apabila tejadi kejadian kesalahan yang terjadi di BUMNag seperti kerusakan fasilitas BUMNag, para pengurus BUMNag tidak saling menyalahkan satu sama lain siapa yang bertanggungjawab atau menuduh satu sama lain, akan tetapi bermusyawarah bersama mencari solusi supaya tidak terjadi kerusakan dan masalah yang lain.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diperboleh kesimpulan bahwa sistem tata kelola BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur masih sederhana, namun tata kelola sangat baik. Kedua BUMNag tersebut lebih mengedepankan kejujuran dan amanah untuk bertanggungjawab kepada Allah. Atas dasar ini mereka melaksanakan sistem tata kelola BUMNag dengan penuh kejujuran, sehingga transparansi dan akuntabilitas keuangan BUMNag tetap efektif dan efisien.

c) **Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif**

Edit dengan WPS Office

Transparansi pengelolaan keuangan sangat penting bagi seluruh pengurus BUMNag. Tujuannya adanya untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada BUMNag memiliki hak yang sama untuk mengetahui kondisi keuangan BUMNag, sedangkan setiap pengurus BUMNag wajib menyampaikan informasi tersebut kepada Pemerintah Nagari.

Bendahara BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas pada buku kas harian BUMNag secara manual. Kemudian setiap penerimaan dan pengeluaran yang telah dicatat secara manual akan dirangkum dan diketik dengan format yang telah ada untuk membuat laporan keuangan BUMNag dan di laporkan kepada pemerintah Nagari dengan memberikan laporan keuangan BUMNag. Laporan ini selanjutnya akan ditempelkan disisi kanan dan kiri BUMNag agar pemerintah Nagari dan masyarakat bisa melihatnya.

Dalam wawancara sekretaris BUMNag Bahagia yaitu Bapak Dede Kurnia Essya, S.Kom mengucapkan hal sebagai berikut: “Setiap pengurus mengetahui tentang pencatatan tersebut, karena setiap rapat diberi tahu, kemudian kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Kemudian setiap kegunaan-

Edit dengan WPS Office

kegunaan di laporkan, misalnya akan membeli fasilitas baru itu pengurus mengadakan rapat dulu. Nanti begitu habis beberapa, kita laporkan setelah selesai pembelian itu, sehingga keadaan uang itu akan terpantau terus baik yang ada, keluar berapa, kemudia masih ada beberapa, itu pengurus harus tahu itu. Yang jelas pengurus harus tahu dan kemudian warga juga secara terbuka harus diberi pengertian melalui papan-papan yang ada di BUMNag, itu cara kita mensosialisasikan keadaan keuangan BUMNag tersebut."

Publikasi kondisi keuangan lainnya yang dilakukan oleh pengurus BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur adalah pelaporan keuangan mingguan yang ditempel pada papan pengumuman atau dinding BUMNag.

BUMNag tidak memiliki sarana khusus untuk penyampaian saran dan kritik dari masyarakat. Jika masyarakat ingin menyapaikan saran atau kritik, maka masyarakat bisa menyampaikan secara langsung atau mendiskusikan saran atau kritik tersebut bersama dengan pengurus lainnya. Saran dan kritik akan dipertimbangkan oleh pengurus, apabila sesuai maka akan diterima. Selain secara lisan, terdapat juga masyarakat yang memberikan

Edit dengan WPS Office

saran dan kritik secara tertulis juga lisan.

d) Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada prinsip analisis yang mencangkup dengan accountability yang kemudian peneliti angkat untuk ditemukan sebagai alasan dari tercapainya tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1) Accountability

Akuntabilitas bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan pengusahaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi, Akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mandat. Sedangkan Lembaga administrasi negara menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan

Edit dengan WPS Office

melalui pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam lingkungan birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan suatu perwujutan kewajiban untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangukutan. Akuntabilitas sering disamakan dengan responbilitas, pertanggungjawaban, tanggung gugat. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, dalam bidang keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Hubungan antara teori ini dengan hasil penelitian ini adalah terkait kontrak dimana kontrak tersebut adalah wewenang kepada untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggung jawab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang desa. Dalam hal ini dengan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa yang bertanggung jawab kepada masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintah BUMNag.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good givernance) telah mendorong

Edit dengan WPS Office

pengembangan dan penerapan sistim pertanggung jawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diterapkan oleh kepala lembaga administrasi negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain prinsip -prinsip sebagai berikut:

a. Adanya komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.

b. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Edit dengan WPS Office

d. Berorioentasi pada visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

e. Jujur, objektif, transparan dan akurat

f. Menyajikan keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut diatas agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dibidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan pengelolan keuangan BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dimulai dari:

a) Perencanaan

Perencanaan untuk pengelolaan BUMNag setiap tahun diwajibkan menyusun pelaporan keuangan BUMNag yang merupakan sumber pembiayaan yang telah dirumuskan

Edit dengan WPS Office

untuk 1 tahun yang akan dipergunakan oleh pengurus BUMNag yang disusun melalui MUSDES di aula desa yang melibatkan pemerintahan Nagari dan pengurus BUMNag dalam operasi menjalankan pengelolaan BUMNag.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Bapak Dede Kurnia Essya, S.Kom dan Ibu Halimah Harahap sebagai berikut:

> "Kami sebagai pengelola BUMNag sudah membuat laporan keuangan tentang realisasi pengelolaan keuangan BUMNag sesuai aturan yang berlaku dan menyampaikan laporan keuangan kepada wali nagari dan masyarakat yang disampaikan paling lambat akhir bulan maret tahun berikunya.(Dede Kurnia Essya, S.Kom dikantor BUMNag Sontang Cubadak).
>
> "Kami telah membuat dan menyampaikan laporan pengelolan keuangan BUMNag kepada wali nagari dan masyarakat. Namun kami tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan sehingga terjadi kendala karena itulah yang menghambat tidak sesuai target yang sudah ditentukan".(Halimah Haharap dikantor BUMNag Bahagia).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pengelola BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia dalam proses perencanaan pengelolaan sudah sesuai dengan tahapan dalam perencanaan. Dalam hal ini pengelolaan di mulai dari musyawarah yang dilakukan pengelolaa BUMNag memimnta usulan pengelolaan BUMNag baik itu bentuk fisik maupun non fisik, dan juga melibatkan segala unsur

Edit dengan WPS Office

masyarakat maupun aparat nagari.

b) Pelaksanaan

Berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 pasal 24 bagian pelaksanaan, bahwa: “Semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas BUMNag dan semua pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan wawancara dengan bendahara BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia.

“Kami sebagai pengelola BUMNag Sontang Cubadak dalam hal melakukan pelaksanaan kegiatan di BUMNag selalu mencatat dan menyampaikan pengeluaran keuangan baik itu penerimaan dana maupun pengeluaran dana melalui lisan atau tulisan kepada pemerintah nagari dan masyarakat dengan cara tersebut dapat untuk menyakinkan kepercayaan masyarakat terhadap kami sebagai pengurus juga pengelola BUMNag hal tersebut juga menghindari hal yang tidak di inginkan seperti fitnah atau tuduhan terhadap pengelola BUMNag seperti melakukan korupsi atau penyelewengan dana maka kami selalu mencatat dan menyampaikan informasi secara lisan atau tulisan kepada pemerintahan nagari dan masyarakat Sontang Cubadak”. (Rima Yanti siregar dikantor BUMNag Sontang Cubadak).

“Pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di BUMNag yang dananya bersumber dari wali nagari, bantuan pemerintah, dan pihak lain yang bekerja sama juga setiap pengurus mengetahui pencatatan tersebut. Karena setiap rapat selalu diberi tahu kemudian, kemudian kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Kemudian setiap kegunaan-kegunaan dilaporkan, misalnya akan membeli fasilitas baru pengurus mengadakan rapat dulu. Nanti begitu habis beberapa, kita laporkan setelah selesai pembelian itu, sehingga keadaan keuangan itu akan terpantau terus baik yang ada, keluar berapa, habis berapa, kemudian masih ada berapa, itu

Edit dengan WPS Office

pengurus harus tahu dan masyarakat juga tahu tentang itu. Yang jelas pengurus dan masyarakat mengetahui hal itu juga pengurus harus terbuka kepada masyarakat dengan memberikan informasi melalui papan-papan informsai yang ada di BUMNag tersebut". (Halimah harahap dikantor BUMNag Bahagia).

Berdasarkan hasil wawancara BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia sudah melaksanakan semua kegiatan BUMNag dengan baik dan pengelolaan keuangan juga dicatat sesuai dengan yang sudah ditentukan serta menyapaikan melalui secara lisan maupun tulisa dan juga memberikan informasi melalui bukti yang sah juga memberitahu informasi kepada masyarakat melalui papan-papan informasi yang ada di BUMNag. Juga menyertakan masyarakat dalam kegiatan atau kinerja yang di buat oleh pengurus dan pengelola BUMNag.

c) Penata usaha

Walinagari Sontang Cubadak menunjuk Bendahara BUMNag sebelum di mulainya tahun anggaran yang bersangkutan yang menerima, menyimpan, menyetor dan menatausahakan pembayaran serta mempertanggung jawabkan keuangan BUMNag Sontang Cubadak. Begitu juga dengan Walinagari BUMNag Bahagia menunjuk Bendahara sebagai penerima dana dari pemerintahan nagari, pengeluaran, penyetoran dan penyimpanan keuangan

Edit dengan WPS Office

BUMNag Bahagia. Dan kedua BUMNag juga mempertanggung jawabkan keuangan melalui laporan pertanggung jawaban dan setiap pengeluaran harus di setujui oleh sekretaris BUMNag atas kebenaran bukti yang lengkap dan sah.

"Berdasarkan wawancara Bendahara BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur

"Penatausaha yang kami lakukan kami juga melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran belanja BUMNag yang mana didalamnya ada buku kas pembantu dan buku kas pembantu tunai".(Rima Yanti dan Halimah Harahap wawancara dikantor BUMNag).

Bersarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur, bahawa kedua BUMNag tersebut sudah melakukan pencatatan dan pengeluaran kedalam buku kas pembantu dan buku kas pembantu tunai yang dicatat oleh bendahara BUMNag.

d) Pelaporan

Berdasarkan permendagri No. 133 tahun 2014 dinyatakan bahwa pemerintahan nagari harus menyampaikan laporan realisasi kepada Bupati/Walikota berupa laporan realisasi Nagari. Laporan disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

Edit dengan WPS Office

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia

“laporan keuangan BUMNag sudah kami laporkan keuangan kepada pemerintahan nagari, kemudian setiap penerimaan dan pengeluaran yang telah dicatat secara manual akan dirangkum dan diketik dengan format yang telah ada untuk membuat laporan keuangan BUMNag dan dilaporkan kepada pihak pemerintah nagari dengan memberikan laporan keuangan BUMNag.(Halimah Harahap dikantor BUMNag Sontang Cubadak).

“Kami telah membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan keuangan BUMNag kepada wali nagari dan masyarakat, namun kami tidak selalu tepat waktu dalam menyapaikan laporan tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan terjadi perubahan anggaran, dalam pelaksanaan sehingga terjadi kendala sehingga kami terlambat melaporkan keuangan BUMNag. Maka dari sanalah terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan”. (Halimah Harahap dikantor BUMNag Bahagia).

Berdasarkan hasil wawancara BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia, bahwa kedua BUMNag melakukan pencatatan dan menyapaikan laporan keuangan tersebut sesuai yang diterapkan dalam melakukan pencatatan dimana BUMNag Sontang Cubadak sudah melakukan pencatatan dan melaporkan keuanganya melalui tulisan maupun lisan kepada pemerintahan nagari dan masyarakat dan tidak mengalami hambatan dalam melakukan pelaporan keuangan BUMNag terhadap pemerintah nagari dengan demikian berjalan lancar.

Edit dengan WPS Office

Sedangkan BUMNag Bahagia juga telah melakukan pencatatan dan penyampaian laporan keuangan kepada pemerintahan nagari melalui bukti yang sah dan memberikan informasi kepada pemerintahan nagari dan masyarakat melalui papan-papan informasi yang ada di BUMNag Bahagia dengan cara tersebut BUMNag Bahagia melakukan pelaporan dengan secara terbuka terhadap pemerintahan nagari dan masyarakat setempat yang berada di daerah BUMNag Bahagia tersebut.

e) Pertanggung jawaban

Berdasarkan dalam kegiatan pertanggung jawaban BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan, pertanggungjawaban BUMNag disusun atau dibuat oleh ketua, sekretaris. dan bendahara. Item dari pertanggung jawaban dimasukkan ke dalam LPJ BUMNag oleh ketua berupa seluruh kegiatan mulai dari program kerja, pemilihan ketua pelaksana, serta kendala dan sarana selama kegiatan.

Salah satu bentuk kebijakan pembangunan desa yakni adanya Badan Usaha Milik Nagari yang berlaku di provinsi Sumatra Barat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 87 ayat (1)

Edit dengan WPS Office

yakni “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMNDes/BUMNag”. Salah satu kabupaten di Sumatra Barat yang memiliki BUMNag yaitu Kabupaten Pasaman. Keberadaan BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia berada di Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatra Barat.

Berdasarkan hasil wawancra dengan Sekretaris BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

> “Pertanggung jawaban sudah kami lakukan dengan menjalankan tugas kami masing-masing yang sesuai dengan perencanaan tugas yang telah di bagi oleh ketua BUMNag Sontang Cubadak, juga begitu dengan BUMNag Bahagia yang mempertanggung jawabkan kegiatan BUMNag yaitu ketua, sekretaris dan bendahara BUMNag Bahagia dimana setiap pengurus maupun pengelolah BUMNag menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh ketua BUMNag dan kami juga berhak bertanggung jawab dengan tugas kami dalam mengelolah BUMNag .(Dede Kurnia Essya, S. Kom dikantor BUMNag Sontang Cubadak dan Halimah Harahap dikantor BUMNag Bahagia).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua sekretaris BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, bahwa kedua BUMNag tersebut sudah mempertanggung jawabkan sesuai tugas masing-masing dan menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan arahan yang telah di berikan

Edit dengan WPS Office

ketua BUMNag. Dengan adanya mekanisme tersebut BUMNag sudah dikatakan transparan terhadap pertanggung jawaban yang dilakukan oleh seluruh pengurus dan pengelola BUMNag, agar tidak adanya kecurigian masyarakat terhadap kinerja-kinerja yang dilakukan oleh pengelola BUMNag termasuk dengan kinerja yang dilakukan oleh masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh pengelola BUMNag.

Edit dengan WPS Office

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuanga BUMNag di BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur melalui pendekatan fenomenologi studi komparatif belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, walaupun tidak memiliki SOP tertulis, namun dalam pelaksanaan kegiatan, pengurus mengikuti aturan-aturan yang sesudah menjadi tradisi dalam kepengurusan BUMNag. Pengurus membuat Laporan Keuangan BUMNag berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas dalam bentuk *single entry* yang diserahkan oleh pengurus kepada pemerintah Nagari serta beberapa pihak tertentu lainnya. Laporan keuangan BUMNag Bahagia diaudit oleh akuntan publik dua bulan sekali, sedangkan laporan keuangan BUMNag Sontang Cubadak belum pernah diaudit, namun kewajaran laporan bisa dinilai oleh pemerintahan Nagari secara dan masyarakat secara langsung. Terdapat pemisahan fungsi pada pengeluaran kas BUMNag yang disimpan pada rekening bank. Tiap bulan BUMNag Sontang Cubadak memberi

Edit dengan WPS Office

gaji atau upah ke pengurus BUMNag, dan juga BUMNag Bahagia juga memberikan gaji kepada pengurus BUMNag.

2. Transparansi pengelolaan keuangan BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Timur melalui pendekatan fenomenologi studi komparatif ialah pengelolaan keuangan BUMNag sudah transparan dengan dapat diaksesnya yang dilakukan dan disediahkan oleh pengurus, pengurus juga menerima saran dan kritik dari masyarakat. Publikasi kondisi keuangan lainnya yang dilakukan oleh pengurus BUMNag Sontang Cubadak dan BUMNag Bahagia Kecamatan Padang Gelugur dan Kabupaten Pasaman Timur keuangan bulan yang di temple pada papan pengumuman atau didinding BUMNag.

B. Saran

Untuk memahami dan menelaah penelitian selanjutnya ada beberapa saran yang dapat ditemukan.

1. Saran Akademis

   a) Agar peneliti selanjutnya membuat kriteria BUMNag untuk di teliti.

   b) Agar peneliti selanjutnya membandingkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan antara beberapa BUMNag.

Edit dengan WPS Office

2. Saran Praktis

a) Bagi pemerintah, ada baiknya memberikan suatu ketentuan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan BUMNag.

b) Bagi pihak pengurus BUMNag, ada baiknya membuat laporan keuangan yang memiliki standar, membuat website BUMNag untuk publikasi, dan kas BUMNag disimpan pada Bank BRI dan Bank Nagari.

Edit dengan WPS Office

Edit dengan WPS Office

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Adisasmita. Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Miliik Nagari (BUM Nagari) Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Aprilia, Lufi. *Pengaruh Good University Governance Terhadap Kepuasan Mahasiswa (studi kasus pada mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang)*. Skiripsi Program Sarjana Fakultas FEBI UIN Walisongo, Semarang, 2017

Fithrina. Hendria. 2016. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Kenagarian Sungai Talang Kab.Lima Puluh Kotasumatra Barat.* Skiripsi: Univesitas Andalas Padang

Good Governance Dalasm Islam (On-line), tersedia di https://jmf.fisipol.ugm.ac.id (27 September 2019)

Halim, Abdul. Kusufi, M.Syam. 2016. *Teori, Konsep Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta : Salembang Empa

Halomoan, Ketua Badan Usaha Milik Nagari, *wawancara*, Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, 04 Februari 2023.

https://id.scribd.com/doc./310241619/badan-Usaha-Milik-Nagari, diakses pada 02 februari 2021.

Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejara Perkembangannya Dan Problematika.* Yogyakarta: Pustaka Pelajaran

Hulme, David dan Mark Turner. 1997. Governance, Administration and Development: Making The State Work. London:Macmillan Press. Hal 123

Koso, Jeli. *Manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. File:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/19203-38830-1-SM.pdf

Mahyuddin Barni Guru Besar Tafsir UIN Antasari, Wawancara Pribadi.

Edit dengan WPS Office

Banjarmasin, 26 Oktober 2018

Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi offset

Mardiasmo. 2018. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET

Mustamin DKK. 2014. *Pembangunan Desa.* LTA Fakultas Hukum, Univesitas Kendari

Nasihatun dan Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bisnis. Vol.3. No.1

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari Dan Badan Usaha Milik Nagari Bersama.

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 ayat (1)

Prabowo,Yulian. *Tinjuan Hukum Islam Dalam Penerapan prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kelurahan way Dadi Baru)*. Skiripsi Program Sarjana Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung

Raba, Manggaukang. 2006. Akuntabilitas Konsep dan Implentasi. Malang : UMM Press

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sumber data : Kantor Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) “KOTO NAN TIGO BAHAGIA” Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Sumber data : Kantor Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

Edit dengan WPS Office

Lampiran 1 SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Nomor : 054.1/Un.26.3/PP.00.9/02/2023

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Alwi Fahrizal** NIM. **3419089** tanggal 06 Februari 2023.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Nagari Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif (Studi Kasus: BUMNag Sontang Cubadak Dan BUMNag Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)"**

Kedua : Menunjuk saudara :

Nama	:	**Nini Sumarni, SE, M.Si**
NIP	:	198810232018012003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk. I /III/b/Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Akuntansi
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Akuntansi
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 06 Februari 2023
Dekan

HJ. ERA PUTERI

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Edit dengan WPS Office

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Bukittinggi, 27 Juni 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

di

Bukittinggi

Assalamu'alaikum wr, wb

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi saya, maka saya berharap Bapak/Ibu dapat mengeluarkan Surat Izin observasi awal bagi saya :

Nama	: Alwi Fahrizal
Nim	: 3419089
Semester	: 8 (Lapan)
Fakultas/Jurusan Syari'ah	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam(FEBI)/Akuntansi
Judul Penelitian	: **"Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Nagari Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif (studi kasus Bumnag Sontang Cubadak dan Bumnag Bahagia Pasaman Timur)**
Lokasi Penelitian	: Jl. Medan Padang kecamatan Padang gelugur kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

Demikian surat ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum, wr, wb

Pemohon,

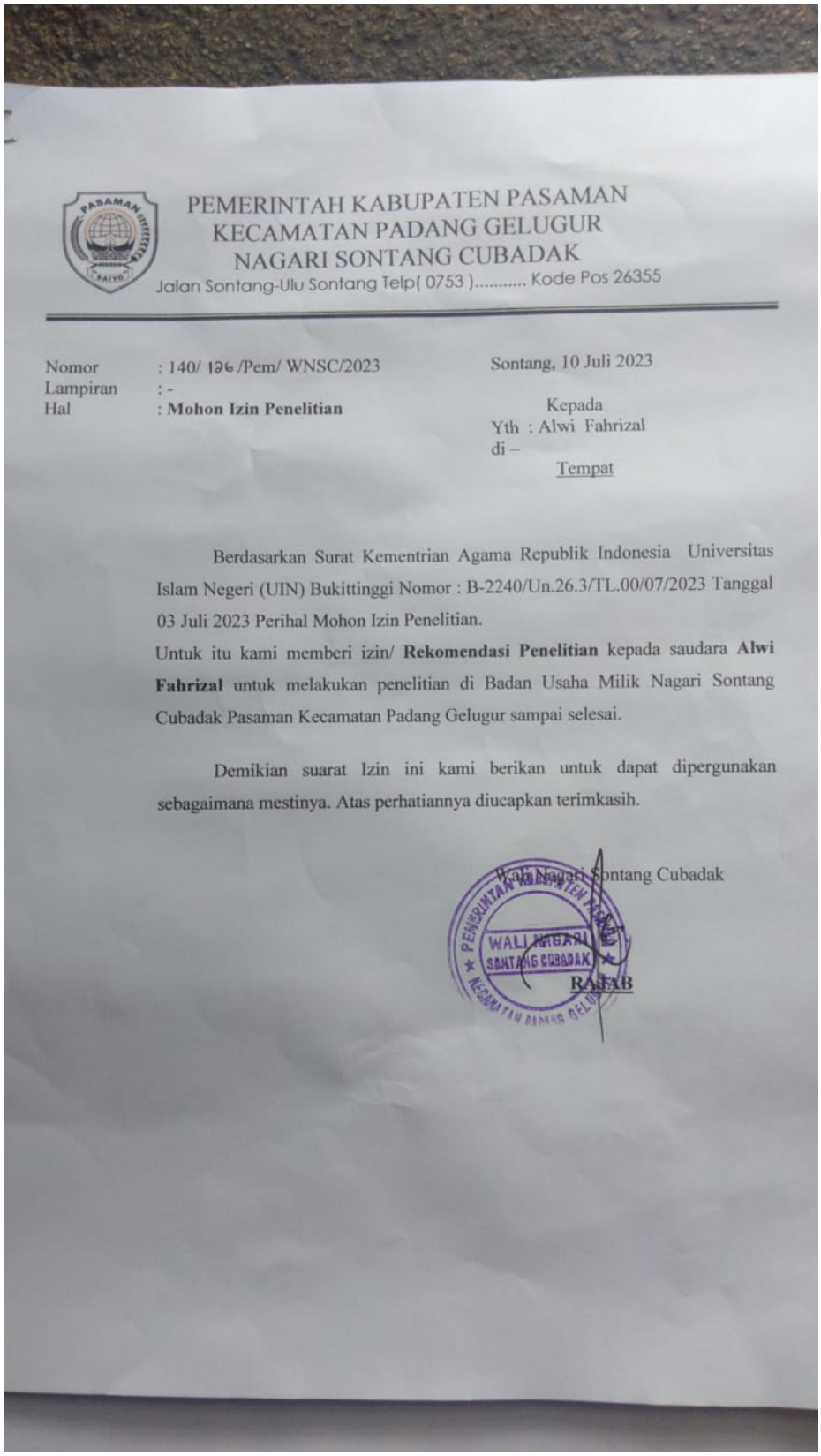
Alwi Fahrizal

NIM.3419089

Edit dengan WPS Office

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian

Edit dengan WPS Office



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN PADANG GELUGUR
NAGARI SONTANG CUBADAK
Jalan Sontang-Ulu Sontang Telp(0753)..... Kode Pos 26355

Nomor : 140/ 126 /Pem/ WNSC/2023
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Sontang, 10 Juli 2023

Kepada
Yth : Alwi Fahrizal
di –
Tempat

Berdasarkan Surat Kementrian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi Nomor : B-2240/Un.26.3/TL.00/07/2023 Tanggal 03 Juli 2023 Perihal Mohon Izin Penelitian.

Untuk itu kami memberi izin/ **Rekomendasi Penelitian** kepada saudara **Alwi Fahrizal** untuk melakukan penelitian di Badan Usaha Milik Nagari Sontang Cubadak Pasaman Kecamatan Padang Gelugur sampai selesai.

Demikian suarat Izin ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimkasih.

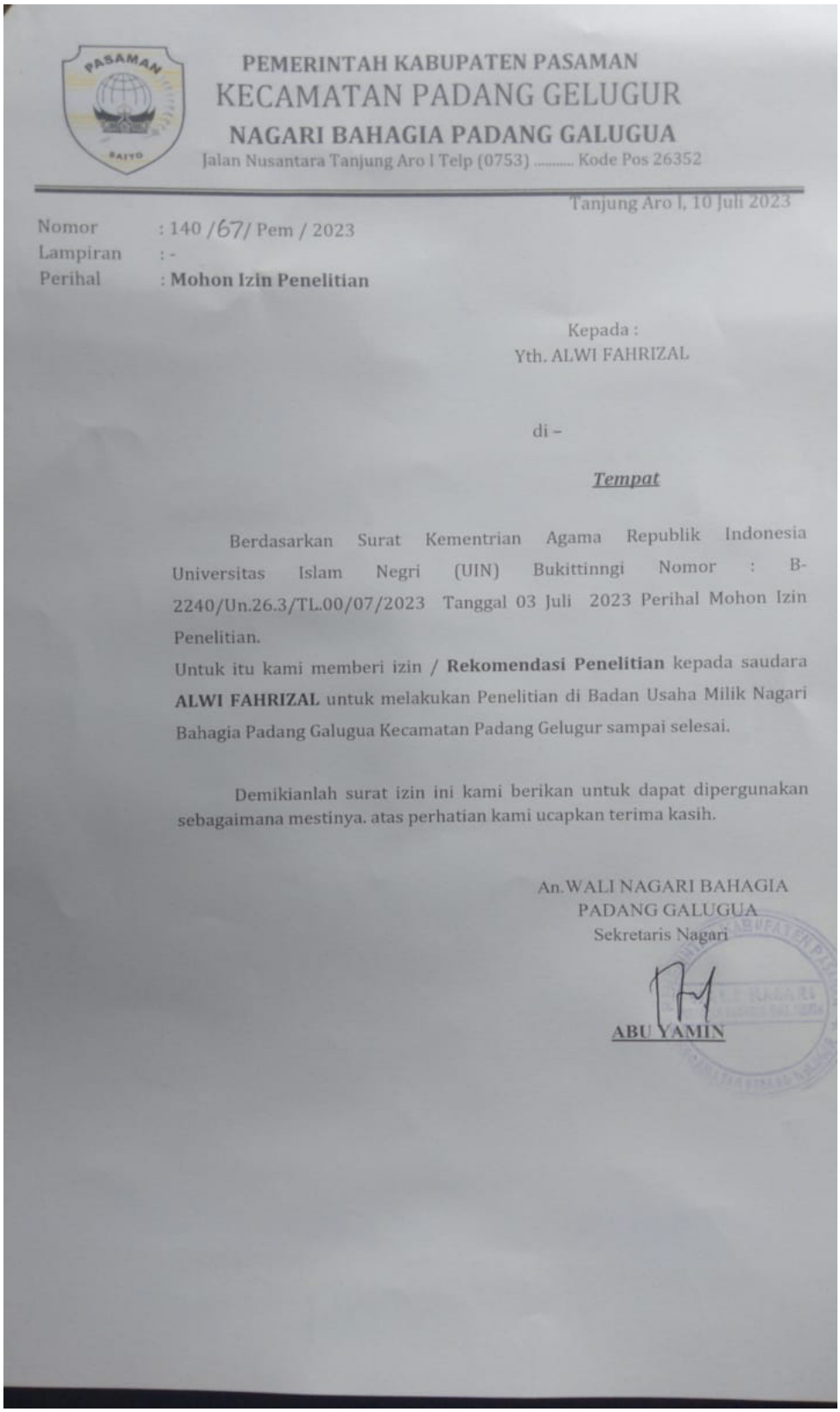
Wali Nagari Sontang Cubadak

WALI NAGARI SONTANG CUBADAK

RAJAB

Edit dengan WPS Office

Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN PADANG GELUGUR
NAGARI BAHAGIA PADANG GALUGUA
Jalan Nusantara Tanjung Aro I Telp (0753) ..... Kode Pos 26352

Tanjung Aro I, 10 Juli 2023

Nomor : 140 /67/ Pem / 2023
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada :
Yth. ALWI FAHRIZAL

di –

Tempat

Berdasarkan Surat Kementrian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negri (UIN) Bukittinngi Nomor : B-2240/Un.26.3/TL.00/07/2023 Tanggal 03 Juli 2023 Perihal Mohon Izin Penelitian.

Untuk itu kami memberi izin / **Rekomendasi Penelitian** kepada saudara **ALWI FAHRIZAL** untuk melakukan Penelitian di Badan Usaha Milik Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur sampai selesai.

Demikianlah surat izin ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

An.WALI NAGARI BAHAGIA
PADANG GALUGUA
Sekretaris Nagari

ABU YAMIN

Edit dengan WPS Office

Lampiran 5 Dokumentasi





Edit dengan WPS Office





Edit dengan WPS Office





Edit dengan WPS Office





Edit dengan WPS Office





Edit dengan WPS Office

DATA RIWAYAT HIDUP

Nama	: Alwi Fahrizal
Nim	: 3419.089
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Tempat / Tanggal Lahir	: Medan, 10 November 2001
No. Handphone	: 0852-7125-2061
Email	:alwisiregar@gmail.com
Alamat	: Binubu, JR-Binubu Rambah Lanai

Orang Tua

Ayah	: Malkan Fahri
Ibu	: Halimah Hrp

Pendidikan

2007 – 2013	: SD Negeri 10 Rambah Lanai
2013 – 2016	: SMP Negeri 01 Padang Gelugur
2016 – 2019	: SMA Negeri 01 Padang Gelugur
2019 – 2023	: UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Edit dengan WPS Office